

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Cetakan ke-2. Kencana. Jakarta.
- Achmad Ruslan. 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Cetakan ke-2. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Ahmad, Fance M. Wantu, Novendri M. Nggilu. 2020. *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Cetakan ke-1. UII Press. Yogyakarta.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. UNPAM PRESS. Pamulang.
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-4. Rajawali Pers. Jakarta.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- I Gde Pantja Astawa, Suprin Na'a. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Cetakan ke-1. PT. Alumni. Bandung.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan ke-1. Mitra Buana Media. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Cetakan ke-1. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT. Kanasius. Yogyakarta.
- Mohammad Mahrus Ali. 2019. *Tafsir Konstitusi: Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*. Cetakan ke-1. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Ni'matul Hudan, R. Nazriyah. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Cetakan ke-1. Nusa Media. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group. Jakarta.

- Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah. 2012. *Ilmu Perundang-undangan*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke-9. Rajawali Pers. Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Aksara Baru. Jakarta.
- Salim, Erlies. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- SF. Marbun, Moh. Mahfud. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-5. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke-35. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-4. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta.

Jurnal

- Ali Imran. 2017. *Pengamalan Norma-Norma Agama dalam Bentuk Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan*. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman. Vol. 3. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.
- Andi Muhammad Yunus Wahid. 2021. *Eksistensi Kepemimpinan Pangadereng Bugis di Tana Bone Sulawesi Selatan: Perspektif Hukum Ketatanegaraan*. Jurnal Amanna Gappa. Vol. 29 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bashori. 2021. *Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Atribut di Lingkungan Sekolah Pemerintah*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 2 No. 2. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

- Firzhal Arzhi Jiwantara. 2019. *Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dan Badan Kepegawaian Negara dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jurnal Jatiswara. Vol. 34 No. 3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Herman. 2017. *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 3 No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Vica J. E. Saija. 2014. *Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Sasi. Vol. 20 No. 2. Universitas Pattimura.
- Zayanti Mandasari. 2013. *Kedudukan Memorandum of Understanding dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-undangan*. Jurnal Hukum IUS QUAIUSTUM. Vol. 20. No. 2. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tesis

- Reza Agung Dwi Kurniawan. 2016. *Tinjauan Yuridis Penetapan Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut UUD 1945
- Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- SKB Menteri Agama (No. 3 Tahun 2008), Jaksa Agung (No. KEP-033/A/JA/6/2008), Menteri Dalam Negeri (No. 199 Tahun 2008) tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.
- SKB Menteri Dalam Negeri (No. 182/6597/SJ), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (No. 15 Tahun 2018), Kepala Badan Kepegawaian Negara (No. 153/KEP/2018) tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan
- SKB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (No. 2 Tahun 2019), Menteri Dalam Negeri (No. 300-5499 Tahun 2019), Menteri Hukum dan HAM (No. M.HH-03.PW.01.01 Tahun 2019), Menteri Agama (No. 977 Tahun 2019), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (No. 432/P/2019), Menteri Komunikasi dan Informatika (No. 961/SKB/M.Kominfo/HK.04.02/11/2019), Kepala Badan Intelijen Negara (No. KEP-250/XI/2019), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (No. 191 Tahun 2019), Kepala Badan Kepegawaian Negara (No. 36/K/KS/XI/2019), Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (No. 01/SKB/Ka.BPIP/11/2019), dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (No. SKB.01/KASN/11/2019) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Aparatur Sipil Negara.
- SKB Menteri Dalam Negeri (No. 220-4780 Tahun 2020), Menteri Hukum dan HAM (No. M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020), Menteri Komunikasi dan Informatika (No. 690 Tahun 2020), Jaksa Agung RI (No. 264 Tahun 2020), Kepala Kepolisian NRI (No. KB/3/XII/2020), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (No. 320 Tahun 2020) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (No. 02/KB/2021), Menteri Dalam Negeri (No. 025-199 Tahun 2021), Menteri Agama (No. 219 Tahun 2021) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadil.

Lembaran Negara RI Tahun 1965 No. 3. Tambahan Lembaran Negara No. 2726.

Internet

KBBI *Online*. *Kesusilaan*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/kesusilaan>